



Ditarget Tuntas 3 Bulan

Vaksinasi 50.000 Anjing

Kutsel Masuk Zona Merah

Wilayah Kuta Selatan dengan populasi anjing terendah tetapi masuk zona merah karena banyak anjing liar. Vaksinasi anjing di Kutsel dilakukan tim khusus.



MANGUPURA, NusaBali

Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnakanlut) Badung menggeber vaksinasi massal anjing. Disasar pertama yakni Kecamatan Kuta Utara, salah satu wilayah dengan populasi anjing paling banyak di Badung. Vaksinasi mengambil start di Desa Dalung. Tahun 2015 sharing anggaran dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk program vaksinasi selama tiga bulan ke depan atau sampai Juli sekitar Rp 1 miliar.

SEORANG petugas dari Disnakanlut Badung melakukan vaksinasi seekor anjing milik warga di Banjar Dukuh, Desa Dalung, Badung Utara, Jumat (17/4).

"Tahun 2015 ini baru yang pertama. Program vaksinasi akan terus dilakukan dari April sampai Juli. Sasaran kami seluruh wilayah di Badung seperti Petang, Abians- emal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakanlut Badung I Gde Asrama, Jumat (17/4).

Vaksinasi massal modelnya jemput bola, petugas dari Disnakanlut menyebar ke masing-masing banjar lalu masuk ke rumah-rumah warga. Menurut Asrama, dengan pola seperti ini diharapkan tidak ada anjing milik warga tak memperoleh vaksinasi secara gratis dari pemerintah. Dan langkah ini lebih efektif, sebab bila



Sambungan

warga yang diminta berkumpul di banjar khawatirnya warga enggan datang dengan bermacam alasan.

Di Badung populasi anjing diperkirakan mencapai 55.000 ekor. Populasi terbanyak yakni Kuta Utara, Mengwi, Abiansemai, Petang, dan Kuta. Meski demikian di wilayah tersebut relatif terkendali. Justru Kuta Selatan yang walaupun populasinya lebih sedikit tetapi wilayah paling selatan Kabupaten Badung ini malah masuk zona merah. Indikasinya banyak anjing liar, sehingga tingkat kerawanannya sangat tinggi. "Iya betul, Kuta Selatan masuk zona merah. Makanya untuk Kuta Selatan ada tim khusus yang melakukan vaksinasi di sana. Terdiri dari tim Disnakanlut kabupaten dan provinsi," jelas Asrama.

"Tidak hanya hari ini (kemarin) saja, tapi bertahap. Besok dan seterusnya sudah ada jadwalnya sampai terakhir bulan Juli," imbuh Asrama.

Walaupun populasi anjing berkisar 55.000, tetapi target vaksinasi hanya 50.000 ekor saja. Asrama menjelaskan, itu berkenaan dengan masalah anggaran. Sehingga,

sisanya atau tinggal 5.000 anjing lagi akan diprogramkan pada APBD perubahan 2015. "Satu ekor anjing itu anggaran vaksinasinya Rp 20.000, jadi tinggal dikalikan saja 50.000 ekor anjing, totalnya Rp 1 miliar," jelasnya.

"Anggaran Rp 1 miliar itu juga sharing. Dari APBD Badung anggarannya untuk 30.000 ekor anjing, provinsi untuk 15.000 ekor anjing, dan APBN untuk 5.000 ekor anjing," tukasnya.

Kepala Disnakanlut Badung Made Badra sebelumnya menegakkan kasus gigitan anjing di Kabupaten Badung nihil dalam beberapa tahun terakhir. Pihaknya mensyukuri hal itu, meski di sisi yang lain pihaknya perlu lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab, pergerakan anjing cukup tinggi sehingga dikhawatirkan hewan yang dikenal sangat setia pada tuannya ini tertular dari daerah lain. "Ke depan kami akan terus telusuri daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat kerawanan akan munculnya kasus rabies. Mengingat ini sangat membahayakan, makanya kami harus sigap," tegas Badra. **as**



Pemprov Siap Kelola SMA/SMK, Selama Audit Diharap Tak Ada Mutasi

★ Pemkab Karangasem Khawatiri Tunjangan Guru

DENPASAR, NusaBali

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan Disdikpora kabupaten/kota menyikapi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait pendidikan khususnya soal pengelolaan SMA/SMK. Dalam UU tersebut disebutkan, pengelolaan SMA/SMK akan dialihkan ke pemprov, bukan lagi dikelola pemkab/pemkot.

Disdikpora Bali pun telah menggelar rapat koordinasi dengan Bappeda, Biro Aset, BKD, serta instansi terkait lainnya. "Rapat berlangsung sekitar sebulan yang lalu. Sebagai langkah awal, akan dilakukan audit di masing-masing kabupaten/kota," jelas Kabid Pengkajian dan Pengembangan (Jibang) Disdikpora Bali I Gede Ketut Seputera Aryadi, saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).

Dikatakan Seputera, bunyi UU mengharuskan pihaknya siap mengelola SMA/SMK se-Bali. "Pascatempat koordinasi, kami di dinas langsung koordinasi dengan pusat," jelasnya. Pelaksanaan audit, kata Seputera, terdiri dari P3D yakni pengelolaan, pend-

anaan, personel, sarana prasarana, dan dokumentasi. "Berdasarkan UU, Oktober 2016 harus sudah kami terima hasil audit dari kabupaten/kota," jelasnya.

Dikarenakan UU ini muncul di tahun 2015, anggaran melakukan audit inipun baru akan diajukan pada anggaran perubahan. "Disdikpora melalui kepala dinas sudah bersurat kepada Gubernur Bali, selanjutnya ke masing-masing kabupaten/kota supaya tidak melakukan mutasi sampai Oktober 2016. Ini agar lebih mudah dalam melakukan audit," jelasnya.

Sementara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karangasem justru khawatir, meskipun nantinya fokus pemkab menangani PAUD, SD, dan SMP. Kekhawatiran itu karena guru-guru SMA/SMK di Karangasem menerima insentif dari pemkab, nantinya belum tentu besaran insentifnya sama seperti yang diterimanya dari pemkab.

Kadisdikpora Kabupaten Karangasem I Gede Ariyasa menyatakan belum mengetahui persis, apakah nantinya guru SMA/SMK menerima insentif dari pemprov. Begitu juga nasib guru-guru PNS yang diper-

bantuan di swasta.

Begitu juga menyangkut persoalan kekurangan guru, bisa saja Pemprov Bali yang mengatasinya. "Misalnya, Karangasem kekurangan guru, bisa saja didatangkan dari Klungkung atau Gianyar," katanya.

Mengenai gaji guru, BOS untuk sekolah negeri dan swasta, apakah sepenuhnya ditangani provinsi? "Tentu saja semuanya dikoordinasikan provinsi, karena undang-undangnya mengamanatkan seperti itu," tambahnya.

Di Kabupaten Karangasem ada 20 SMA negeri dan swasta, 10 SMK negeri dan swasta. Di samping itu banyak sekolah swasta membutuhkan perhatian sarana, tenaga pendidik, dan bantuan lainnya.

"Kami sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah mengenai SMA/SMK pengelolannya nanti diambilalih Pemprov Bali. Sebelum pengelolaan resmi dari provinsi, terlebih dahulu ada serah terima aset," katanya.

Itulah sebabnya, diawali adanya pendataan aset, seperti yang tertuang dalam Dapodik. "Dapodik telah kelar, tinggal nantinya memutakhirkan data terbaru," tambahnya. **n, k16**

Edisi : Sabtu, 18 April 2015.

Hal : 3



Rencana Pengelolaan Taman Budaya di Tangan Perusda **Perusda Insidental, UPT Perlu Evaluasi**

Perusda bisa mengelola Art Center saat sepi kegiatan seni dan budaya. Sedangkan agenda yang terjadwal, seperti PKB, diserahkan ke UPT.

DENPASAR, NusaBali

Rencana menyerahkan pengelolaan Taman Budaya (Art Center) Denpasar kepada Perusahaan Daerah (Perusda) mendapat tanggapan berbeda dari anggota DPRD Bali. Perusda bisa diserahi mengelola, tetapi saat tertentu saja. Sementara jika pengelolaan oleh UPT selama ini dinilai kurang optimal, sebaiknya dilakukan evaluasi.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Gede Kusumaputra mengatakan, pengelolaan aset Pemprov Bali di Taman Budaya kepada Perusda harus dikaji ulang. Menurutnya, Perusda bisa mengelola Taman Budaya pada hari tertentu, yakni mengisi kekosongan kegiatan di Taman Budaya. Hal itu karena sudah ada UPT Taman Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Pemprov Bali. "Selama ini mereka mengelola Taman Budaya. Kalau dinilai kurang maksimal, ya, dilakukan evaluasi," ujar

Kusumaputra, Jumat (17/4).

Apakah berarti menolak Perusda mengelola Taman Budaya? "Saya tidak menolak Perusda diserahi mengelola Taman Budaya. Namun diajak duduk bersama dulu Perusda, Dewan Bali, UPT atau Dinas Kebudayaan," imbuh Kusumaputra.

Menurut Kusumaputra, Gubernur Made Mangku Pastika hendaknya memanggil stakeholder dulu. Perusda bisa diberikan kesempatan mengelola sepanjang tidak berorientasi bisnis semata. Perusda bisa saja, tetapi hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya di luar kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB).

"Saya takutkan jadi kejar untung, karena ini perusahaan daerah yang orientasinya pasti profit, nanti malah sisi seni dan kebudayaan terabaikan. Kalau Perusda siap *balance* tidak hanya profit oriented mungkin masih bisa ditoleransi ada kolaborasi dengan UPT di bawah Dinas Kebudayaan," tegas politisi asal Buleleng, ini.

Taman Budaya di luar PKB bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan seni dan parade budaya supaya nilai-nilai budaya bisa tetap eksis. Di samping itu juga mendatangkan pendapatan bagi daerah. "Ide menghidupkan Taman Budaya oleh Gubernur Pastika, kami tidak ada masalah. Sekarang penataan Taman Budaya, terutama fasilitas publik harus dibenahi. Atraksi seni nanti

kalu jadi dikelola secara profesional juga tidak boleh asal-asalan. Kualitas seniman yang tampil dan pendapatan bagi seniman juga harus layak," ujar mantan anggota Komisi II DPRD Bali, ini.

Ide menyerahkan Taman Budaya kepada Perusda ini secara terpisah mendapatkan lampu hijau dari Pansus Aset DPRD Bali. Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Wayan Gunawan secara terpisah mengatakan Taman Budaya salah satu aset Pemprov Bali yang kurang maksimal pengeloannya. "Kalau kami di Pansus Aset, Taman Budaya dikelola dengan profesional untuk menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah), cukup bagus ide itu. Kami minta supaya dikaji segala aspek dulu. Ketimbang sekarang ada Taman Budaya tetapi sepi kegiatan seni dan budaya. PKB setahun sekali. Setelah PKB *nggak* ada kegiatan," ujar Gunawan, anggota Komisi I DPRD Bali.

Dia mengatakan Pansus Aset berpikiran logis karena aset yang mangkrak jelas merugikan daerah. "Karena memerlukan biaya perawatan, pemeliharaan. Ketimbang aset itu tidak maksimal, dimanfaatkan kami sepakat kalau Perusda diberikan mengelola secara profesional. Dengan catatan dilakukan kajian matang dan seluruh yang terkait harus hitung dulu itu," ujar politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli, ini. **nat**

Edisi : Sabtu, 18 April 2015.

Hal : 3